



The Urgency of Church Political Participation in Indonesia

Martin Luther Manao
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Corresponding Author: Martin Luther Manao luthermartin429@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Elections, Open Proportional System, Church Politics

Received : 7, February

Revised : 15, March

Accepted: 29, April

©2024 Manao: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Politics and the church are two things that are always debated in Christian circles because for some people the church does not need to involve itself in politics because it has a different call to service, but for others it encourages the church to contribute to political progress because the church is actually the light. and the salt of the earth and is indispensable for salting and illuminating the world of politics. The church cannot turn a blind eye to the social problems faced directly by the church because this is part of the ministry's duties that the church must pay attention to. Based on these debates, the author conducted research on the Urgency of Church Participation in Politics in Indonesia using a qualitative approach, namely research with descriptive analysis. In this research, the data used was obtained through a literature review sourced from research results, books, news, publication reports which were then analyzed descriptively. From the research results, it is concluded that Jesus is an example of the church's moral politics in fighting for freedom, truth and justice, so the practical politics that can be played by the church is moral politics through the church's participation in politics through an active role in controlling the government, criticizing government policies and fighting for truth and justice for all Indonesian citizens. The practical politics of the church in the midst of political problems in Indonesia are: First, with political education for church members so that they become intelligent voters who are able to vote well so that political leaders and representatives are found who are able to fight for the aspirations of the church.

Urgensi Partisipasi Politik Gereja di Indonesia

Martin Luther Manao

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Corresponding Author: Martin Luther Manao luthermartin429@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka, Politik Gereja

Received : 7, February

Revised : 15, March

Accepted: 29, April

©2024 Manao: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Politik dan gereja merupakan dua hal yang selalu menjadi perdebatan dikalangan kekristenan oleh karena bagi sebagian orang gereja tidak perlu melibatkan diri dalam politik karena memiliki tugas panggilan pelayanan yang berbeda tetapi bagi sebagian yang lain mendorong gereja untuk ikut berkontribusi dalam kemajuan politik oleh karena gereja sesungguhnya adalah terang dan garam dunia dan sangat diperlukan untuk menggarami dan menerangi dunia politik. Gereja tidak dapat menutup mata terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi langsung oleh gereja karena hal tersebut merupakan bagian tugas pelayanan yang harus diperhatikan oleh gereja. Berdasarkan perdebatan tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang Urgensi Partisipasi Gereja Dalam Politik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian dengan pemaparan secara deskriptif analisis. Pada penelitian ini data yang digunakan diperoleh melalui kajian literatur yang bersumber dari hasil penelitian, buku-buku, berita, laporan publikasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Yesus merupakan teladan politik moral gereja dalam memperjuangkan kebebasan, kebenaran dan keadilan maka politik praksis yang dapat diperankan oleh gereja adalah politik moral melalui partisipasi gereja dalam politik melalui peran aktif mengontrol pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Politik praktis gereja ditengah persoalan politik di Indonesia ialah: Pertama, dengan pendidikan politik bagi warga gereja sehingga menjadi pemilih yang cerdas yang mampu pemilih dengan baik sehingga didapati pemimpin dan perwakilan politik yang mampu memperjuangkan aspirasi gereja.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, pada umumnya kontestan selalu berupaya untuk menarik empati dan meraih dukungan para pemilih dari berbagai kelompok masyarakat. Berbagai cara digunakan, mulai pendekatan kontrak politik, pendekatan bantuan sosial maupun eksploitasi isu suku, ras dan agama. Semua program dibungkus rapi dalam jargon untuk memperjuangkan dan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Pendekatan politik dengan mengeksploitasi isu-isu primordialisme merupakan hal yang paling laris mengingat sangat mudah menggugah dan meraih empati kelompok tertentu dan biayanya rendah. Pendekatan dengan menggunakan isu SARA di kenal juga dengan istilah politik identitas yakni strategi politik yang mempertajam suatu perbedaan dan menggunakan ikatan primordialisme.

Praktik politik Identitas dengan menggunakan isu primordialisme terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 memberikan dampak buruk dan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, Praktik politik Identitas kemudian di praktikan kembali dengan pola yang sama pemilihan Tahun 2018 dan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 lalu yang hasilnya menimbulkan polarisasi yang tajam ditengah masyarakat. Penggunaan isu SARA didalam pemilihan dan pemilu seakan menjadi salah satu strategi kampanye politik didalam memenangkan pemilu dan pemilihan. Hal lain yang sering terjadi ialah penyebaran berita hoax dan isu-isu negative dan berita provokatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Gun Heriyanto bahwa dalam pemilu, Isu negative dan berita hoax tentu akan selalu muncul dalam rangka untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat sehingga muncul empathy dan keberpihakan. Ada beberapa modus didalam menciptakan ketegangan atau konflik dalam dialetika relasional pada setiap musim kampanye yang pertama ialah distorsi informasi yakni penyebaran informasi melalui media sosial yang menimbulkan kesalahpahaman hal ini digunakan untuk membangun citra positif pelaku dan menjatuhkan citra pasangan lawan. Kedua pembunuhan karakter yakni penggunaan strategi propaganda untuk mendelegitimasi lawan seperti labelling, Ketiga dramatisasi cerita palsu yakni dengan mengkonstruksi narasi hoax melalui pemanfaatan sentiment psikologis yang terbentuk di khalayak akibat terjadinya polarisasi dukungan yang tajam, dan yang keempat ialah eksploitasi isu berdaya ledak tinggi seperti SARA dan pemanfaatan sentiment sosiologis melalui mobilisasi sosial dan politik identitas.

Isu politik identitas pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2024 diperkirakan akan menjadi dagangan politik oleh para makelar politik yang ingin meraih dukungan secara murah meriah melalui eksploitasi isu SARA tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya bagi negeri ini. Penggunaan politik identitas yang menimbulkan polarisasi ditengah masyarakat tentu menimbulkan disharmonisasi di tengah-tengah masyarakat dan dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dikalangan gereja tidak lepas dari kegaduhan politik yang disebabkan oleh adanya tokoh gereja yang dinilai kurang bijak dalam membuat statement dan memberikan dukungan kepada tokoh tertentu dalam pemilu dimana bagi

sebagian warga gereja bahwa hal tersebut tidak etis. Isu keterlibatan pemimpin gereja dalam politik merupakan suatu hal yang sudah lama diperdebatkan mengingat gereja sebagai institusi rohani atau institusi yang bersifat sakral sedangkan politik merupakan institusi kenegaraan. Dua isu ini memberikan pandangan yang menganggap bahwa gereja merupakan lembaga yang sakral terkait dengan urusan kerajaan Allah di dunia sehingga ia tidak bisa dicampuradukan dengan praktik politik yang cenderung duniawi dan kotor dan jauh dari standar etika. Akibat pandangan ini membuat gereja-gereja menutup diri terhadap kegiatan-kegiatan politik dan kurang memberikan ruang bagi para kontestan pemilu/pemilihan untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

Tentu harus diakui bahwa keberadaan gereja ditengah-tengah bangsa ini merupakan realita akan adanya keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga merupakan sebagai instrument didalam melakukan perubahan-perubahan sosial ditengah-tengah masyarakat. Karena sesungguhnya gereja dimana pun berada akan identik dengan pembawa perubahan karena sifat dasarnya yang identik dengan perubahan. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 29:7 " *Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.*" Keberadaan gereja dan pemimpin-pemimpinnya dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak bisa melepaskan diri atau menutup mata dalam melihat persoalan-persoalan politik dan persoalan sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Mengingat mereka memiliki tugas dan fungsi pengembalaan yakni mendidik dan mengajar jemaat agar menjadi pribadi yang cerdas, kritis dan peduli dengan sesama, peduli dengan persoalan-persoalan bangsa. Berdasarkan uraian pada latar belakang tentu menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana seharusnya gereja melihat politik? Selanjutnya bagaimana gereja berperan dalam politik.

PELAKSAAN DAN METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan pemaparan secara deskriptif analisis. Moleong mengatakan bahwa pendekatan deskriptif dapat digunakan apabila data yang menjadi bahan analisis berbentuk dokumen gambar dan catatan. Dalam Penelitian ini, data diperoleh melalui kajian literatur yang bersumber dari hasil penelitian, buku-buku, berita, laporan publikasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam sebuah uraian tentang Urgensi Partisipasi Gereja Dalam Politik di Indonesia. Setelah uraian hasil dan pembahasan, maka penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politisasi Agama dan Peran Agama yang Sesungguhnya dalam Politik.

Pesta demokrasi selalu identik dengan kemeriahan. Namun juga tidak lepas dari kegaduhan yang menimbulkan polarisasi. Kemeriahan dan kegaduhan merupakan suatu yang wajar oleh karena politik itu merupakan upaya untuk memperjuangkan dan memperebutkan kekuasaan oleh banyak orang. Namun menjadi persoalan ketika dalam kegaduhan politik tersebut menimbulkan keresahan, polarisasi hingga berujung kepada konflik antar sesama anak bangsa.

Terjadinya kegaduhan dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi Menurut Sekarwati bahwa kegaduhan politik di tanah air tentu disebabkan oleh banyak faktor, komunikator politik yang sering menyampaikan pesan yang menyerang lawan politik dan bermuatan ujaran-ujaran kebencian yang sangat personal maupun tuduhan atas setiap kebijakan-kebijakan yang di buat oleh lawan politik sehingga berkembang menjadi isu publik yang menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama dapat menjadi suatu kekuatan politik ketika dijadikan alat politik dalam meraih kekuasaan. Keterlibatan agama dalam politik sering menjadi perdebatan oleh karena agama seharusnya hadir untuk menjadi pembawa perubahan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetapi kehadiran agama dalam politik juga membawa dampak negative yakni ketika agama didominasi oleh kekuatan politik maka agama menjadi mudah diselewengkan. Dominasi kekuatan politik terhadap agama membuat agama itu sendiri kehilangan marwahnya, kehilangan fungsinya sebagai perubahan moral politik.

Agama merupakan bagian yang selalu ditarik keranah politik mengingat jumlah anggota atau pengikut yang besar dan kemudahan didalam mempengaruhi para pengikut serta biaya yang rendah. Rendahnya literasi masyarakat di Indonesia secara umum memudahkan para pemimpin agama, politikus dan partai politik didalam mengeskplotasi dan memanipulasi warga masyarakat kedalam kepentingan politik sehingga sering menimbulkan kegaduhan politik. Politisasi agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat didalam menentukan pilihannya. Hal ini di ungkapkan oleh Fadil Nur Rif'an dalam penelitiannya di Palembang bahwa perilaku pemilih didasari oleh adanya politisasi agama yang berkembang dimasyarakat sehingga menghilangkan rasionalitas didalam menentukan pilihan pada pemilihan umum khususnya pada pemilu presiden dan wakil presiden.

Realita politik tersebut menunjukkan bahwa hubungan agama dan politik di Indonesia merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk meraih kekuasaan tentu diperlukan kerjasama politik antar berbagai pihak dan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat dan agama sekalipun. Untuk meraih empati dan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dan kelompok agama diperlukan pengaruh dari pemimpin agama yang tidak jarang berujung kepada komitmen politik dalam bentuk pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Legitimasi agama atas kekuasaan politik merupakan hal yang sangat dominan dalam perpolitikan di Indonesia oleh

karena agama merupakan suatu yang melekat dalam diri para politikus maupun pemimpin partai baik secara personal maupun secara kelembagaan. Kuatnya relasi agama dan politik di Indonesia membuat agama menjadi bahan eksploitasi dalam meraih kekuasaan. Eksploitasi agama ini menurut Masdar Hilmy merupakan politik sublimasi yakni suatu strategi politik untuk mengalihkan mata publik dari sesuatu yang bersifat semu, palsu dan menipu yakni sesuatu yang berupa ketidakmampuan melakukan hal-hal yang semestinya atau terdapat tendensi untuk menutupi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada. Lebih lanjut Masdar menjelaskan bahwa melalui politik sublimasi sejumlah elite berharap dapat memuaskan sisi sentimentalisme dan primordialisme konstituen di sebuah negara yang masih kental nuansa religiusnya. Artinya berbagai kelemahan dan kekurangan dari pasangan kandidat tertentu diharapkan dapat tertutupi oleh politik pengalihan.

Politisasi agama tentu memberikan keuntungan sesaat bagi orang dan kelompok tertentu tetapi secara tidak langsung merusak citra agama itu sendiri oleh karena telah kehilangan identitasnya sebagai alat transformasi moral dan alat transformasi sosial termasuk juga sebagai alat transformasi politik. Lely Arianie mengatakan bahwa dengan politisasi agama, orang tidak lagi memikirkan kebaikan agama dan bahkan cenderung memberikan pembenaran kepada pihak yang ingin di diskreditkan seolah tidak beragama, tidak beriman merupakan pembenci agama dan bahkan dinilai sebagai orang yang akan merusak agama.

Dengan maraknya politisasi agama dalam pesta demokrasi di Indonesia tentu berdampak terhadap menurunnya kualitas demokrasi dan tidak memberikan gambaran masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang agamais. Selain itu maka kegagalan pemimpin hasil pemilu yang dihasilkan oleh politisasi agama justru merusak citra agama itu sendiri. Terkait dengan hal ini maka Agun menjelaskan bahwa ajaran agama seharusnya menjadi ruh kehidupan politik sehingga nilai luhur ajaran agama menjadi moral politik bukan menjadi alat politik. Ketika agama menjadi moral politik maka tentunya kehidupan politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara akan dipenuhi dengan nilai-nilai kejujuran, sopan santun, saling menghargai, tidak ada hujatan, caci maki dan kehidupan yang penuh dengan etika. Hal senada di sampaikan oleh Ricard Daulay bahwa Tugas agama-agama adalah melakukan politik agama, bukan politisasi agama. Politik agama adalah politik kenabian (*prophetic politics*) bukan politik partisan (*partisan politics*). Politik agama adalah politik moral yang mengeluarkan suara kenabian termasuk melakukan kritik kepada pemerintah dan pejabat publik yang berkuasa, yang tidak menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab.

Setiap agama memiliki tanggungjawab moral dalam menyuarakan kebenaran, keadilan dan kejujuran sehingga setiap proses politik yang melahirkan kebijakan politik dilakukan secara benar, jujur dan adil. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus ketiga melakukan pelayanan di dunia dengan berani menentang kejahatan, penjajahan dan ketidakadilan serta melakukan gerakan moral yang bersifat membangun.

Peneliti setuju bahwa pada dasarnya Yesus tidak pernah melarang pengikutnya untuk berpolitik, justru ia hadir dalam dunia khususnya di Israel yang mengalami gejolak politik saat itu dimana penjajahan Kerajaan Romawi atas Israel sedang terjadi dan pada masa ini bangsa Israel menantikan seorang Mesias yang membebaskan bangsa Israel dan mengusir penjajah walaupun pada kenyataannya justru Yesus menyuatkan perubahan moral, menentang penyalagunaan kekuasaan, menyuatkan ketaatan kepada pemerintah, menyuatkan kebenaran dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin gereja dapat mengambil peran dalam kondisi politik saat ini yang masih memerlukan gerakan perubahan moral oleh karena tidak semua sistem dan fungsi politik serta fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana semestinya sehingga memberikan dampak negatif bagi perpolitikan yang muaranya kepada kebijakan-kebijakan politik yang berdampak bagi rakyat Indonesia.

Dalam konteks sosial dan politik di Indonesia yang masih cukup memprihatinkan dimana tingkat kemiskinan yang cukup tinggi khususnya pada kantong-kantong gereja sebagaimana diungkapkan oleh Martin bahwa terdapat 4 (empat) provinsi yang merupakan kantong gereja yang tingkat kemiskinannya merupakan urutan 4 (empat) besar di Indonesia, kemudian persoalan politik transaksional yang dapat merusak karakter dan budaya politik dalam masyarakat dan melahirkan elit politik yang berperilaku korup, penegakkan hukum yang masih pandang bulu, pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara khususnya dalam memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta pengrusakan lingkungan dan keserakahan dalam penguasaan sumber daya alam yang tidak seimbang yang menimbulkan kesenjangan ditengah-tengah masyarakat, disini pemimpi gereja dapat meneladani teladan yang di tunjukkan oleh Yesus sekaligus berperan sebagai agen perubahan sebagaimana dikatakan dalam Matius 5:13-14 bahwa kamu adalah "Garam dan Terang Dunia" yang dapat diartikan bahwa pemimpin gereja harus mampu memberikan pengaruh positif dalam politik di Indonesia yang memerlukan perubahan. Politik di Indonesia memerlukan gerakan perubahan moral dan hal ini dapat dilakukan oleh pemimpin gereja sebagai tanggungjawab terhadap kondisi sosial dan politik yang terjadi.

Praksis Politik Gereja

Politik seharusnya menjadi suatu yang menarik bagi pemimpin-pemimpin gereja oleh karena setiap persoalan ditengah masyarakat baik persoalan HAM, persoalan pembangunan dan pengembangan perekonomian yang tidak merata yang melahirkan kemiskinan diberbagai daerah dan banyak persoalan lainnya merupakan bagian yang harus dipikirkan dan dipedulikan oleh gereja. Untuk menangani persoalan-persoalan tersebut tentu harus memilih pemimpin yang mampu menyelesaikannya dengan baik, dan hanya melalui mekanisme politik yaitu melalui pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta pemilih yang cerdas mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Thomas Tokan Pureklolon mengatakan bahwa politik satu dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam proses pembuatan keputusan dalam

kehidupan bernegara. Dalam dunia politik, kekuasaan merupakan tujuan utama yang harus di raih. Dalam politik kekuasaan dikenal aliran politik kekuasaan yakni *struggle for power* atau untuk sekedar berkuasa dan yang kedua adalah aliran politik kekuasaan yang bertitik tolak dari prinsip *who gets what, when and how* (siapa merebut apa, kapan dan bagaimana?). Kedua aliran ini tentu memiliki perbedaan. Dalam politik *struggle for power* dilakukan melalui suatu afiliasi dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama yakni bahwa kekuasaan bukan sekedar berkuasa melainkan untuk membuat kebijakan politik dan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pandangan kedua yakni politik alokatif yakni aliran yang memandang bahwa politik itu tidak harus melalui suatu partai politik secara formal melainkan dapat melalui aktivis sosial maupun aktivis keagamaan yang rutin melalui ceramah keagamaan. Politik alokatif yang serius dilaksanakan oleh setiap kader partai politik, aktivis sosial, aktivis ekonomi dan aktivis iptem maupun agama merupakan satu kekuatan politik sehingga dengan sendirinya akan mampu mereduksi dampak negative dari politik afilatif.

Oleh karena politik merupakan upaya untuk meraih kekuasaan baik itu kekuasaan dibidang eksekutif maupun kekuasaan dibidang legislatif maka penting bagi seluruh warga gereja untuk memastikan bahwa orang yang dipilih dan berkuasa adalah orang yang memenuhi kualifikasi dan mampu menjadi pemimpin negara bagi seluruh kelompok dan mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kesalahan didalam memilih pemimpin akan berdampak buruk bagi bangsa ini. Mengingat bahwa proses politik khususnya dalam pengkaderan calon-calon pemimpin negara maupun pemimpin daerah yang berkualitas belum sepenuhnya berjalan dan lebih mengutamakan popularitas dari pada kualitas maka hal ini menjadi kepedulian gereja untuk memberikan pendidikan bagi warga gereja dalam memahami arti penting politik bagi gereja dan bagi bangsa dan negara. Pertimbangan ini maka seharusnya politik dapat dipandang sebagai sesuatu yang menarik dan sebagai ladang pelayanan oleh karena kehadiran dan dampak gereja sebagai terang dan garam diperlukan ditempat-tempat yang membutuhkan perubahan. Politik transaksional dan politik identitas serta politik menghalalkan segala cara merupakan politik yang kotor dan berdampak buruk dikemudian hari sehingga peran politik moral dapat dilakukan pemimpin gereja oleh karena pada dasarnya mereka memiliki fungsi guna mencerdaskan pengikut-pengikutnya agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar dalam bertindak.

Gereja dan pemimpinnya tentu tidak dapat menutup mata dan melepaskan diri atau abai terhadap persoalan-persoalan politik yang juga merupakan sebagai persoalan masa depan gereja dan juga masa depan bangsa oleh karena setiap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dihasilkan melalui proses politik. Maka gereja harus hadir memberikan dampak dalam setiap proses politik untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan menentukan pemimpin bangsa dan negara sehingga mampu menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin negara yang berpihak kepada masyarakat dan mampu membawa kemajuan dan menciptakan keadilan. Peran gereja dalam politik moral yang menyuarakan suara kenabian harus dimulai sejak dini melalui edukasi politik

guna meningkatkan literasi politik warga gereja dan warga masyarakat sehingga mampu secara rasional menggunakan hak pilihnya dalam menentukan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara. Dengan demikian maka apapun bentuk politik primordialisme yang dimainkan dalam setiap perhelatan demokrasi untuk memecah belah dan mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat tangkal dan diminimalisir. Bagaimanakah seharusnya gereja berperan dalam politik dalam mewujudkan fungsinya bagi kemajuan politik di Indonesia? Berikut beberapa usulan yang dapat diajukan terkait peran gereja dalam politik.

Peran pemimpin gereja dalam politik merupakan hal penting oleh karena Pemilu sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemimpin akan terwujud apabila masyarakatnya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang bagaimana menggunakan hak pilih dengan benar dan bertanggungjawab tanpa dipengaruhi oleh politik identitas dan politisasi agama. Untuk mengatasi persoalan-persoalan politik tersebut maka peneliti mengajukan beberapa bentuk yang perlu dikerjakan oleh pemimpin gereja sebagai bagian tugas pelayanan penggembalaan yakni melalui edukasi politik terhadap jemaat dan partisipasi politik adalah sebagai berikut:

1. Edukasi Politik Bagi Warga Gereja

Sejatinya, pendidikan politik terhadap masyarakat itu merupakan tanggungjawab penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemerintah karena secara fungsional Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi sosialisasi politik kepada masyarakat. Namun keterbatasan dan belum maksimalnya peran partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat maka diperlukan peran berbagai elemen bangsa untuk melakukan fungsi pendidikan politik dimaksud. Rendahnya literasi politik masyarakat Indonesia tentu ikut menentukan perilaku politik dalam menggunakan hak pilihnya. Perilaku politik yang mudah dipengaruhi oleh isu-isu primordialisme berdampak besar bagi masa depan bangsa oleh karena hal ini akan menentukan kualitas dalam pengambilan kebijakan politik.

Peningkatan literasi politik bagi warga gereja dalam menentukan pemimpinnya merupakan hal penting oleh karena: *Pertama*, melalui pemilu/pemilihan diberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Kualitas Pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu ditentukan oleh tingkat literasi politik warga masyarakat khususnya warga gereja. Kualitas pemimpin merupakan hal penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kemajuan bangsa dan kemajuan daerah. Salah dalam memilih pemimpin akan berdampak buruk bagi daerah maupun negara. Oleh karena itu partisipasi pemimpin gereja untuk ikut meningkatkan literasi politik warga gereja merupakan bagian pelayanan yang harus dikerjakan. *Kedua*, pemilu merupakan sarana pergantian kepemimpinan maka untuk menghasikan pemimpin yang berkualitas dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat maka diperlukan partisipasi pemimpin gereja dalam mencerdaskan warga gereja maupun masyarakat sehingga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dan bertanggungjawab. Pengetahuan yang baik akan menolong masyarakat didalam

menentukan pilihannya dengan baik. Hal ini senada apa yang disampaikan Martin bahwa demokrasi memerlukan partisipasi politik dari warga negara karena hal tersebut merupakan prasyarat penting berjalannya sebuah demokrasi dan juga mengindikasikan tingkat legitimasi terhadap perwakilan atau pemimpin yang dipilih.

Peneliti sepakat bahwa hanya melalui pengetahuan dan kesadaran yang baik tentang demokrasi dapat menghasilkan pemimpin di legislatif dan yudikatif yang memiliki kualitas. Hanya melalui proses pendidikan yang baik akan menghasilkan pemilih yang cerdas yang mampu membedakan mana kandidat yang baik dan berkualitas mana yang tidak dan tentu pemilih tidak mudah untuk dibeli dan di perdaya dengan janji-janji kosong para kandidat.

2. *Dorongan dan Dukungan Bagi Warga Gereja Untuk Berpartisipasi Dalam Politik.*

Dunia politik sering sekali di pahami sebagai dunia yang sarat dengan intrik, arena adu strategi, adu kekuasaan dan kekuatan. Padahal dunia politik merupakan arena dimana masyarakat menunjukkan partisipasi untuk mendapatkan keterwakilan.

Dalam konteks bernegara di era modern dimana penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana untuk menentukan wakil rakyat, sarana untuk menentukan pemimpin pemerintahan maka setiap anak bangsa dituntut kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam proses politik oleh karena semua yang dihasilkan dari proses politik akan memberikan pengaruh kepada kemajuan bangsa. Martin mengungkapkan bahwa salah satu konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yakni kewajiban untuk berpartisipasi dalam politik dan pemilu. Karena melalui sarana inilah masyarakat diberikan kebebasan untuk menggunakan haknya dalam menentukan pemimpin maupun wakil-wakilnya.

Peran gereja dalam mengatasi persoalan-persoalan politik di Indonesia merupakan suatu keharusan oleh karena gereja akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah sosial, masalah ekonomi dan masalah hukum yang berasal dari kebijakan-kebijakan politik yang tentunya dihasilkan para wakil-wakil rakyat maupun pemimpin dibidang eksekutif yang dipilih melalui pemilu. Melalui peran gereja dalam persoalan-persoalan sosial dan politik menunjukkan bahwa gereja tidak lagi membatasi diri dalam urusan internal melainkan untuk kepentingan semua orang. Dengan demikian maka identitas gereja sebagai terang dan garam dunia menjadi nyata dan dirasakan oleh semua orang.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh gereja merupakan bagian penting aktualisasi fungsi gereja ditengah-tengah masyarakat. Hal ini senada dengan *Glen H. Stassen & David P. Gushee* yang mengatakan bahwa mendekati politik melalui aksi kepedulian pastoral dan visi moral pastoral yang berbelas kasihan tentu akan berdampak secara luas dan dalam terhadap bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri dalam kancah pergumulan publik tentang sebuah kesetaraan atau keadilan khususnya bagi kelompok yang termarginalkan.

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk melakukan pergantian kepemimpinan dan memilih wakil-wakil rakyat, oleh karena itu diperlukan dorongan dan dukungan bagi warga gereja yang ingin berpartisipasi sebagai kontestan sehingga tersedia pilihan calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas serta mau melayani rakyat. Sebagaimana

dikatakan oleh Martin bahwa pemimpin yang berkualitas dan berjiwa melayani dihasilkan melalui sebuah proses pembentukan dan pemilihan yang benar. Mendorong dan mendukung warga gereja yang memiliki kualifikasi kepemimpinan dan memiliki *track record* yang baik merupakan bentuk tindakan praksis politik gereja sehingga dapat menjadi sarana menyalurkan aspirasi dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini penting menurut peneliti oleh karena tanpa keterwakilan dan tanpa ikatan politik terhadap para kandidat yang maju dalam pemilihan akan sulit bagi gereja dalam menyalurkan aspirasi. Ikatan politik yang terbangun maka gereja dapat terlibat dalam mengontrol pemerintah agar tidak bertindak semena-mena, diskriminatif terhadap masyarakat dan bertindak adil dalam pembangunan dan pengembangan perekonomian.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yesus merupakan teladan politik moral gereja dalam memperjuangkan kebebasan, kebenaran dan keadilan maka politik praksis yang dapat diperankan oleh gereja adalah politik moral melalui partisipasi gereja dalam politik melalui peran aktif mengontrol pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.
2. Politik praktis gereja ditengah persoalan politik di Indonesia ialah: Pertama, dengan pendidikan politik bagi warga gereja sehingga menjadi pemilih yang cerdas yang mampu menggunakan hak pilihnya dengan baik sehingga didapati pemimpin dan perwakilan politik yang mampu memperjuangkan aspirasi gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Firman Noor, Irine Hiraswari Gayatri, Syafuan Rozi, *Politik Identitas: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, diakses pada tanggal... Januari 2023
- Gun-Gun Heriyanto, *Panggung Komunikasi Politik*, (Jogyakarta: IRCiSoD, 2019), 14-144
- Sekarwati, *Peran Komunikator Politik dan Kegaduhan Politik Nasional, Politik Indonesia Kini: Potret Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada*, Editor: Abdul Azis SR, (Intrans Publishing, Malang, 2019) 31
- Haniah Hanafie, Anna Sabhana Azmy, *Kekuatan-Kekuatan Politik*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 112
- Fadil Ainul Rif'an, *Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019, Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan*, Jurnal JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2020, 98
- Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita: Etika Politik, Rasionalitas dan Kesalehan Publik* (Malang: Intrans Publishing, 2017), 3

- Lely Arrianie, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), 212
- Agun Funanjdar Sudarsa, *Pemilu Damai Berintegritas dan Menyejahterakan*, (Jakarta: RMBOOKS, 2019), 67
- Richard Daulay, *Tugas Gereja Dalam Dunia Politik*, Gema Methodis (Edisi 12 Tahun 2009), 12
- Manao, M. L., & Amtiran, A. A. . (2021). Teologia Pembebasan: Kajian Peranan Penting Gereja Dalam Memerdekakan Masyarakat Dari Kemiskinan. *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 105–121. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i2.27>
- Thomas Tokan Pureklolon, *Perilaku Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020), 67
- Mohammad Jafar Hasfah, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: PT.Pustakan Sinar Harapan, 2011), 147-148
- Manao, Martin Luther, Data Transparency of Legislative Candidates Viewed from the Theory of Popular Sovereignty. *Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP)* Vol. 3 No. 1 2024: 19 - 32
- Dian Sari Pertiwi, Mendorong Demokratisasi Panggung Politik Perempuan dalam Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia, Editor: Gun-Gun Heryanto, (IRCiSoD, Jogjakarta, 2019), 271
- Manao, Martin Luther; Purba, Asmat. Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat. *Jurnal TEDC*, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 12-17, jan. 2022. ISSN 2776-723X. Available at: <http://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/548>. Date accessed: 30 may 2023
- Glen H. Stassen & David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam Konteks Masa Kini*, (Surabaya: Momentum, 2013), 632
- Manao , M. L. ., Sampaleng, D. M., Manao, M., & Nainggolan, A. M. . (2022). PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN PEMIMPIN GEREJA YANG BERKUALITAS. *JMPK : Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen*, 2 (1), 50-64. <https://doi.org/10.51667/jmpk.v2i1.88>